

Skripsi Ivan

by Ivan Dwi Putra

Submission date: 02-Jul-2025 03:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2709221127

File name: wayae_turnitin_bismillahh.docx (1.61M)

Word count: 11075

Character count: 72841

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, pembangunan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup suatu negara demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Upaya peningkatan kualitas hidup tersebut diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia agar mampu menghasilkan berbagai gagasan konstruktif yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan unggul, pembangunan menjadi sebuah langkah yang sangat penting. Pembangunan sendiri mengandung esensi berupa perubahan yang diharapkan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Harapan masyarakat terhadap pembangunan pada umumnya berkaitan dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup yang layak. Namun demikian, tidak seluruh lapisan masyarakat mampu mencapainya, karena masih ditemukan kondisi kehidupan yang kurang memadai, salah satunya disebabkan oleh masalah kemiskinan. Kemiskinan ini sering kali merupakan hasil dari adanya ketimpangan atau kesenjangan sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat.

Kegagalan untuk mencapai standar hidup khas penduduk setempat disebut kemiskinan. Keadaan ini terlihat dari rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. (Okuputra, 2022; Rahman, 2019). Dalam upaya mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), baik pemerintah federal maupun daerah telah meluncurkan sejumlah program untuk menurunkan angka kemiskinan. Terdapat 169 target, 241 indikator, dan 17 tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun di Indonesia, sesuai dengan aturan Presiden No. 59 Tahun 2017, 17 tujuan tersebut diringkas menjadi 4 pilar. Pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, dan pilar hukum serta tata kelola merupakan empat pilar tersebut. (Ansori, 2018; Arif Sofianto, 2019; Ishartanto & Raharjo, 2016). Berdasarkan data jumlah kemiskinan tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa timur adalah Provinsi yang mempunyai angka kemiskinan tinggi di Indonesia.

Kemiskinan adalah masalah yang berat dalam pembangunan yang terjadi di negeri ini, kemiskinan di Indonesia sendiri merupakan hal yang tidak tabu lagi untuk didengar dimana kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun sebagian besar terjadi di pedesaan. Dimana kemiskinan merupakan suatu kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup setiap masyarakat. Hal ini terjadi karena pendapatan dari

masyarakat tersebut yang masih belum tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya

keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Kemiskinan adalah salah satu masalah sulit yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan.

¹⁹ Kemiskinan merupakan permasalahan berskala global yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Keadaan miskin menggambarkan situasi di mana individu atau kelompok tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, sandang, tempat tinggal yang memadai, layanan pendidikan, serta akses terhadap fasilitas kesehatan. Keterbatasan dalam ³pek ekonomi berdampak langsung pada keterbatasan dalam memiliki tempat tinggal yang layak huni. Masyarakat yang hidup di rumah tidak layak huni digolongkan sebagai bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang masuk dalam kategori kemiskinan kronis. Kondisi ini memerlukan penanganan secara serius melalui pendekatan yang menyeluruh, terkoordinasi antar sektor, dan dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat mengurangi dampak dan mendorong perbaikan ² kesejahteraan secara menyeluruh.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi. Beberapa penduduk mempunyai ekonomi yang masih terbilang dibawah rata-rata, oleh karena itu mereka tidak mampu untuk menstabilkan ekonominya.

Permasalahan kemiskinan dan tingginya tingkat kepadatan penduduk merupakan isu yang kerap dihadapi oleh masyarakat di Kota Surabaya. Kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mencapai kehidupan yang layak. Kondisi kemiskinan sering diidentikkan dengan keterbatasan daya, minimnya akses terhadap sumber daya, serta kesulitan untuk terlibat dalam sektor-sektor ekonomi yang produktif (Ismawati & Subhan, 2018). Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah ⁴⁵angnya pemberdayaan masyarakat, yang berdampak pada rendahnya pendapatan ⁷hususnya bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Indonesia sendiri menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu mencapai 260 juta jiwa (Investments, 2017). Tingkat kepadatan penduduk sangat memengaruhi kualitas hidup suatu ⁶⁸negara. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih menantang di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Situasi ini kerap menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup mencolok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang mampu mewujudkan

pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1
Tabel 1.1 Jumlah Kemiskinan Tertinggi di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2022

NO	Provinsi	Jumlah kemiskinan
1	JAWA TIMUR	4.236,51
2	JAWA BARAT	4.053,62
3	JAWA TENGAH	3.858,23
4	SUMATRA UTARA	1.262,09
5	NUSA TENGGARA TENGAH	1.149,17
6	SUMATRA SELATAN	1.054,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Data kemiskinan di Kota Surabaya, Jawa Timur, per Maret 2024 menunjukkan penurunan yang signifikan, Jumlah penduduk miskin: 116,62 ribu jiwa, turun 19,75 ribu jiwa dari Maret 2023 Persentase penduduk miskin: 3,96%, turun dari 4,65% pada Maret 2023 Garis kemiskinan di Kota Surabaya³² da tahun 2022-2023 adalah: 2022: Rp 652.540, 2023: Rp 718.370. Sementara itu, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yaitu 3,98 juta jiwa atau 9,79%³¹

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial yang hingga kini masih menjadi fokus utama penanganan di Indonesia. Setiap tahunnya, angka kemiskinan menunjukkan tren peningkatan yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, termasuk di wilayah perkotaan seperti Kota Surabaya. Untuk menanggulangi persoalan ini, Pemerintah Kota Surabaya—bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan berbagai lembaga terkait—terus melakukan berbagai upaya melalui kebijakan dan p¹⁹ram yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan menyediakan layanan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah³⁷tu bentuk konkret dari langkah tersebut adalah program yang digagas oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota²⁵ Surabaya, yang difokuskan pada kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada warganya. Salah satu har⁴⁷n besar pemerintah adalah agar setiap warga dapat memiliki rumah layak huni sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi keluarga (Area, 2019). Pemenuhan kebutuhan akan hunian yang layak juga menjadi bagian penting dari strategi peningkatan derajat kesehatan masyarakat

serta penciptaan lingkungan pemukiman yang sehat dan aman (Nisa & Salomo, 2019:5).Tabel 1. 2 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Kota Surabaya

NO	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1	Wonokromo	Sawunggaling	Prioritas I
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	Prioritas II
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis	Mejoyo Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	Prioritas III
17	Asemrowo	Asemrowo	
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat dengan keberadaan rumah tak layak huni, karena keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan seringkali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal yang sehat dan

aman. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat mereka tidak mampu memperbaiki atau membangun rumah yang memenuhi standar kelayakan huni, baik dari segi struktur, sanitasi, ⁵⁷upun ventilasi. Akibatnya, banyak keluarga miskin yang terpaksa tinggal di rumah yang tidak memenuhi ⁷⁷syarat kesehatan dan keselamatan, seperti rumah yang sempit, bocor, atau tidak memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai. Rumah tak layak huni ini memperburuk kualitas hidup, karena tidak hanya berisiko menurunkan kesehatan fisik penghuni, tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan ekonomi mereka. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya berdampak pada akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga menciptakan lingkaran setan di mana kualitas hunian yang buruk memperburuk kondisi kemiskinan itu sendiri.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah terdata dan berada dalam pantauan Pemerintah Kota Surabaya menjadi sasaran prioritas dalam pemberian berbagai bentuk bantuan, meliputi layanan kesehatan, pendidikan, akses terhadap lapangan kerja, serta penyediaan tempat tinggal yang layak. Di bidang kesehatan, masyarakat miskin yang memiliki KTP dengan domisili Kota Surabaya berhak memperoleh fasilitas BPJS Kesehatan gratis kelas 3. Sementara itu, untuk sektor pendidikan, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan beasiswa khusus bagi pelajar yang tergolong dalam kategori MBR. Dalam hal peningkatan akses lapangan kerja, Pemkot bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan melalui pelaksanaan Program Padat Karya. Sedangkan untuk mendukung kelayakan tempat tinggal, kerja sama dilakukan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU). Berdasarkan standar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kelayakan hunian dinilai dari beberapa indikator, antara lain kesesuaian terhadap standar minimum massa bangunan (penampilan fisik) dan ruang (baik bagian dalam maupun luar), terpenuhinya aspek kesehatan dan kenyamanan, serta adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang sesuai dengan ketentuan minimal (Rahmah & Subadi, 2021).. ⁴

Dalam rangka memprioritaskan perbaikan rumah tidak layak huni, data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencatat bahwa sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan program renovasi atau bedah rumah sebanyak 3.544 unit. Di tahun 2020, pemerintah menargetkan renovasi untuk 1.000 unit rumah di berbagai wilayah Surabaya. Namun, akibat adanya pandemi COVID-19, realisasi program tersebut hanya mencapai 461 unit rumah. Kemudian, pada tahun 2021, program ini berhasil merenovasi 842 unit rumah sehingga memenuhi standar kelayakan huni (Pampur, Devy Pramudiana, dan Kamariyah, 2024). Memasuki tahun 2022, target renovasi sebanyak 900 unit berhasil terlampaui

dengan total realisasi mencapai 929 unit rumah¹. Adapun pada tahun ini, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan target perbaikan sebanyak 2.000 unit rumah. Di sisi lain, berdasarkan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, pada tahun 2019 masih terdapat kawasan kumuh seluas 42,46 hektar yang tersebar di 21 kawasan perkotaan. Bahkan pada tahun 2021, luas wilayah kumuh tersebut mengalami peningkatan menjadi 43,46 hektar. Dengan kondisi tersebut, peran aktif dari kelompok-kelompok pengelola kawasan kumuh sangat diperlukan untuk mendukung upaya penanganan berdasarkan prinsip prioritas pembangunan perkotaan. Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat, salah satunya melalui program perbaikan rumah tidak layak huni sebagai langkah menuju kehidupan warga yang lebih sehat, aman, dan berartabat⁷.

Kota Surabaya, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan salah satu kota terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait perumahan. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang tinggi, banyak wilayah di Surabaya mengalami peningkatan jumlah rumah yang tidak layak huni. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Surabaya diperkirakan mencapai lebih dari 3 juta jiwa. Pertumbuhan ini berdampak pada kebutuhan perumahan yang semakin meningkat. Dikutip dari jurnal Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cimahi Tahun 2020. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak rumah yang tidak memenuhi standar layak huni, dengan data menyebutkan sekitar 20% rumah di Surabaya tergolong tidak layak huni (Gunadi, Kostini, and Alexandri 2023).

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan hidup, tetapi juga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi masyarakat. Menyadari pentingnya isu ini, Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program Dandan Omah sebagai upaya strategis untuk mengatasi permasalahan perumahan yang ada. Program ini bertujuan untuk menciptakan rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Program "Dandan Omah" di Kota Surabaya adalah salah satu inisiatif yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan di kota tersebut, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman yang kurang layak huni atau kumuh. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah-rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi penghuninya.

Program Dandan Omah (dalam bahasa Jawa, "dandan" berarti memperbaiki atau mempercantik) diluncurkan untuk menanggulangi masalah pemukiman kumuh dan tidak layak huni yang masih banyak ditemukan di kota Surabaya. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap bantuan perumahan, dan perkembangan infrastruktur yang tidak merata. Program Dandan Omah adalah inisiatif Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui pendekatan gotong royong dan padat karya. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) program ini menyasar rumah-rumah yang kondisinya tidak memenuhi standar kelayakan huni, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup penghuninya, Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kesehatan dengan perbaikan rumah, diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat, serta meningkatkan kualitas lingkungan sekitar, Pemberdayaan Ekonomi Lokal pekerjaan perbaikan dilakukan oleh warga setempat melalui Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR), yang tidak hanya memperbaiki rumah tetapi juga meningkatkan keterampilan dan pendapatan mereka

Pemerintah Kota Surabaya ingin memberikan solusi bagi warga yang memiliki rumah yang rusak atau tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, agar mereka bisa memiliki rumah yang layak huni dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Salah satu program unggulan ini berfokus pada perbaikan rumah di kawasan yang paling membutuhkan, seperti di kawasan padat penduduk, kawasan kumuh, atau permukiman dengan kualitas rumah yang buruk. syarat penerima program Rutilahu atau Dandan Omah. Di antaranya yakni, mempunyai KK dan KTP Surabaya, diusulkan oleh lurah, mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa

Program Dandan Omah bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif. Dengan melibatkan warga dalam proses perbaikan, program ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, program ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak dan berkelanjutan. Dalam program Dandan Omah melibatkan beberapa langkah kunci, seperti pendataan rumah tidak layak huni, penyediaan bantuan materi dan tenaga kerja, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat, juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Surabaya. Dalam program ini, rumah yang tidak

layak huni akan diperbaiki melalui bantuan stimulan. Pemerintah memberikan dana atau material yang diperlukan untuk memperbaiki rumah, seperti mengganti atap, memperbaiki dinding, memperbaiki saluran air, dan menyediakan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Selain itu, bantuan juga bisa berupa pelatihan teknis kepada warga agar mereka bisa melakukan perbaikan rumah secara mandiri dengan cara yang efisien dan berkualitas (Sri Kasiami 2019).

Dasar hukum yang mendasari Program Dandan Omah ini adalah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni. Program Dandan Omah merupakan bagian dari upaya Pemkot Kota Surabaya untuk memenuhi hak dasar warganya atas rumah yang layak huni. Program Dandan Omah merupakan salah satu program yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan dasar papan (rumah) warga Surabaya.

Program Dandan Omah di Kota Surabaya merupakan inisiatif penting dalam meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan, terutama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Dengan melibatkan masyarakat dalam perbaikan rumah mereka, program ini tidak hanya memberikan perbaikan fisik pada rumah, tetapi juga mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun tantangan tetap ada, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya, program ini tetap memiliki dampak positif yang signifikan dalam menciptakan Surabaya yang lebih layak huni dan nyaman bagi warganya (Syaputra et al. 2021).

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang strategi pemerintah dalam program Dandan Omah sangat penting untuk menilai efektivitas dan dampaknya. Latar belakang ini menjadi landasan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah Kota Surabaya berupaya mewujudkan rumah layak huni dan menjawab tantangan perumahan yang dihadapi oleh warganya.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks program Dandan Omah yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, terdapat beberapa isu dan tantangan yang perlu dianalisis untuk memahami efektivitas strategi yang diterapkan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi program Dandan Omah untuk mewujudkan rumah layak huni di Kota Surabaya?
- 2) Apa faktor pendorong dan penghambat implementasi program Dandan Omah untuk mewujudkan rumah layak huni di kota?

34

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami strategi pemerintah dalam program Dandan Omah untuk mewujudkan rumah layak huni di Kota Surabaya. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi program Dandan Omah untuk mewujudkan rumah layak huni.
- 2) Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam proses implementasi Program Dandan Omah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai program Dandan Omah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya memiliki manfaat yang sangat penting, baik bagi pengembangan kebijakan pemerintah, masyarakat, maupun akademisi. Berikut adalah beberapa manfaat penelitiannya :

a) Manfaat Teoritis

- 1) Kontribusi terhadap Pengembangan ilmu Perencanaan dan Ilmu Pembangunan Perkotaan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap ilmu perencanaan kota, khususnya dalam hal penyediaan rumah layak huni. Program Dandan Omah sebagai topik penelitian dapat memperkaya pemahaman mengenai pendekatan yang digunakan dalam meningkatkan kualitas rumah dan pemukiman diperkotaan.
- 2) Peningkatan Pemahaman tentang Implementasi kebijakan Sosial dan Perumahan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan teori tentang implementasi kebijakan perumahan, khususnya di wilayah urban seperti Surabaya. Hal ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut mengenai keberhasilan atau tantangan dalam pelaksanaan program perumahan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- 3) Penyediaan Model Implementasi Program Perumahan. Hasil penelitian ini dapat memberikan model implementasi program perumahan yang lebih aplikatif, menghubungkan antara kebijakan pemerintah dan penerima manfaat dilapangan. Model ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut dalam bidang perumahan dan pembangunan kota.

b) Manfaat Praktis

- 1) Peningkatan Kualitas Hunian di Surabaya. Secara langsung, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas rumah-rumah yang ada di Surabaya, khususnya di kawasan yang membutuhkan perbaikan untuk memenuhi standar rumah layak huni.

- 2) ⁸nduan bagi Pemerintah dalam Menyusun Kebijakan Perumahan. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota ⁴³ Surabaya dalam merancang atau memperbaiki kebijakan terkait penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Implementasi program ini dapat menjadi contoh bagaimana program tersebut dapat dijalankan secara lebih efisien dan ⁵⁹ktif.
- 3) Rekomendasi untuk perbaikan Program Dandan Omah. Penelitian ini juga dapat memberikan saran dan rekomendasi praktis bagi pengelola Program Dandan Omah dalam meningkatkan efektivitas program tersebut. Dengan evaluasi yang berbasis pada data lapangan, diharapkan program ini bisa lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas rumah masyarakat Surabaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

- a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Gambar 4.1 Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Sumber : Google

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya adalah lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan di wilayah Surabaya. Dinas ini memainkan peran penting dalam mendukung terciptanya kota yang tertata rapi, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan daerah, DPRKPP telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan struktur hingga secara resmi diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021. Dengan visi menjadikan Surabaya sebagai kota berkelas dunia yang maju dan manusiawi, DPRKPP menjalankan misi membangun dan menata ruang kota secara terpadu melalui penyediaan infrastruktur serta sarana publik yang modern. Tugas utama

dinas ini meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengawasan program, hingga pembinaan teknis di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Salah satu program prioritasnya adalah Dandan Omah, yaitu program bantuan perbaikan rumah untuk masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial. Dalam upaya transparansi dan pelayanan publik, DPRKPP juga menyediakan akses informasi dan layanan melalui kantor pusat, saluran telepon, email, dan website resmi, sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan warga Surabaya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memiliki visi yaitu Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan. Visi ini mencerminkan komitmen DPRKPP untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota yang maju, berdaya saing global, dan berkelanjutan melalui semangat gotong royong. Sedangkan Misi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yaitu Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan. Misi ini menekankan perencanaan dan pengelolaan tata ruang yang terintegrasi untuk menciptakan lingkungan yang layak huni dan berkelanjutan.

b) Gambaran umum program dandan omah di Kota Surabaya

Program Dandan Omah merupakan inisiatif Pemerintah Kota Surabaya yang dijalankan 31 Maret 2022 oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Program ini bertujuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (rutilahu) melalui pendekatan padat karya, dengan melibatkan warga setempat dalam proses renovasi. Program ini terus berkembang dan menjadi salah satu program prioritas dalam penataan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas hidup warga di Surabaya, melalui dinas teknis untuk mengatasi persoalan perumahan yang tidak layak huni. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali. Target utamanya adalah kawasan padat dan kumuh, dengan pelaksanaan berbasis data dari kelurahan dan RT/RW. Dalam hal ini pemerintah memfokuskan kepada calon penerima bantuan yang benar-benar layak untuk diberikan bantuan program ini.

Program Dandan Omah juga menjadi salah satu bentuk intervensi Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPP-CKTR) untuk menangani permasalahan rumah tidak layak huni. Program ini mulai dijalankan sejak beberapa tahun terakhir dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui perbaikan fisik rumah. Pelaksanaan program ini

menyasar rumah warga yang berada di wilayah kumuh, terutama di kawasan padat penduduk. Pendataan dilakukan oleh petugas kelurahan dan diverifikasi oleh dinas terkait. Warga yang memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan berupa material bangunan serta pendampingan teknis dalam proses renovasi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang menggunakan enam variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana.

Tujuan utama program ini secara spesifik adalah untuk membantu warga yang tinggal di rumah dengan kondisi fisik tidak layak—seperti atap bocor, dinding rusak, lantai tanah, dan sanitasi yang buruk—agar bisa hidup dalam hunian yang aman, sehat, dan manusiawi. Sasaran program adalah warga miskin atau rentan miskin yang tinggal di wilayah padat penduduk dan telah memenuhi kriteria verifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Program ini memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat terutama yang mendapatkan bantuan ini, karena penerima manfaat program ini bisa merasakan dampak besar untuk hunian mereka.



Gambar 4. 2 Bukti Program Dandan Omah
Sumber : DetikNews

3

4.1.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan memaparkan data baik berupa teks catatan maupun hasil dilapangan. Dengan demikian data dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga data yang telah diperoleh kemudian disusun secara logis dan dikaitkan dengan teori atau konsep yang menjadi landasan penelitian. Penyajiannya dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, grafik, atau ilustrasi visual lainnya agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

4.1.3 Implementasi program dandan omah

Implementasi Program Dandan Omah di Kota Surabaya dilakukan dengan mengacu pada enam indikator model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, lingkungan sosial-politik-ekonomi, serta standar dan tujuan kebijakan. Dari hasil penelitian, wawancara, dan observasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi antara pelaksana program seperti Dinas Perumahan, kelurahan, RT/RW, dan masyarakat berjalan cukup baik. Sosialisasi dilakukan melalui rapat, pemasangan spanduk, serta pengumuman di tingkat RT/RW. Informasi juga disampaikan langsung oleh pelaksana ke warga. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam penyampaian informasi yang tidak merata, pelaksana lapangan tetap responsif dalam menanggapi keluhan dan menjangkau warga secara langsung.

2) Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi masih mengalami kendala, terutama dari segi jumlah tenaga pelaksana dan waktu pelaksanaan yang terbatas. Namun demikian, kendala ini diatasi melalui kerja sama antara dinas, kontraktor, dan masyarakat. Meski anggaran dan alat terbatas, pelaksana tetap memaksimalkan sumber daya yang ada agar program dapat diselesaikan sesuai target.

3) Disposisi (sikap pelaksana)

Para pelaksana menunjukkan sikap tanggung jawab, loyalitas, dan komitmen tinggi terhadap keberhasilan program. Prosedur dan SOP dipatuhi dengan baik, serta pelaksana menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi hambatan. Kelurahan dan RT/RW juga sangat mendukung jalannya program ini.

4) Struktur Birokrasi

Implementasi program didukung oleh struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi, terdiri dari Dinas Perumahan, Kelurahan, RT/RW, kontraktor, dan kadang Dinas Sosial sebagai penyedia data MBR. Meskipun ada

kendala miskomunikasi di beberapa titik, koordinasi antar lembaga secara umum berjalan efektif dan efisien.

5) **Lingkungan sosial, Politik, dan Ekonomi**

Lingkungan sosial sangat mendukung, dengan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program ini. Namun, ada tantangan dari kondisi geografis seperti rumah di gang sempit dan cuaca hujan yang menghambat pembangunan. Secara politik, terdapat tekanan dari oknum tokoh masyarakat untuk memasukkan nama yang tidak sesuai kriteria, tetapi pelaksana tetap berpegang pada aturan dan verifikasi lapangan.

6) **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Tujuan utama program untuk mewujudkan rumah layak huni bagi warga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas telah dipahami dan dijalankan dengan baik. Proses verifikasi berlapis dari RT/RW, kelurahan, hingga survei lapangan memastikan bantuan tepat sasaran. Masyarakat memahami dan mendukung tujuan program, bahkan berharap program terus berlanjut karena dinilai sangat bermanfaat.

Berdasarkan analisis enam indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan Program Dandan Omah di Kota Surabaya secara umum berjalan cukup efektif. Dalam hal komunikasi, para pelaksana mampu membangun alur informasi yang cukup baik melalui berbagai media sosialisasi seperti pertemuan warga, spanduk, hingga penyampaian langsung, meskipun masih terdapat ketimpangan dalam distribusi informasi. Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah personel dan waktu pelaksanaan tidak menghambat kinerja karena berhasil diatasi melalui kolaborasi aktif antara dinas teknis, kontraktor, dan masyarakat penerima manfaat. Selanjutnya, sikap pelaksana menunjukkan dedikasi tinggi, dibuktikan dengan kepatuhan terhadap prosedur dan fleksibilitas dalam menghadapi kendala teknis di lapangan. Struktur birokrasi juga terbentuk secara jelas dan mendukung, dengan pembagian peran yang terkoordinasi antar instansi, walau sesekali terjadi miskomunikasi yang masih dapat diatasi secara internal. Dari aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dukungan warga sangat positif, tetapi tantangan teknis seperti akses jalan sempit dan intervensi dari pihak eksternal tetap menjadi hambatan yang harus diwaspadai. Adapun tujuan utama program yang berfokus pada peningkatan kelayakan hunian bagi warga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas telah tercermin dalam implementasi, dengan verifikasi berjenjang yang memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Keseluruhan pelaksanaan program menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan, program ini telah memberikan manfaat nyata dan mendapat penerimaan yang kuat dari masyarakat.

4.2.1 Komunikasi (*communication*)

Indikator komunikasi dalam konteks program dandan omah di Kota Surabaya mencerminkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat terutama yang mendapatkan bantuan program Dandan Omah.

Berikut hasil wawancara bersama bapak Arsyad selaku sekretaris DPRKPP sebagai berikut ;

Dari pertanyaan pertama pada 4 Juni yaitu, Bagaimana cara informasi program ini disampaikan ke masyarakat?



Gambar 4. 3 Pemasangan Stiker Bukti Dandan Omah
Sumber : Detik.com

“Biasanya pemerintah kordinasi dengan RT/RW, kemudian juga kelurahan. Terkadang kita memasang spanduk di kelurahan supaya masyarakat tahu bahwa ada program dandan omah yang dilaksanakan pemerintah dilingkungan mereka. Dan juga terkadang kita melakukan survei kepada rumah-rumah yang menjadi sasaran program dandan omah ini”.~ Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara diatas bapak Arsyad menyatakan bahwa pemerintah melakukan kordinasi terhadap para Kelurahan, RT/RW setempat yang menjadi sasaran program Dandan Omah yang masuk kriteria untuk mendapatkan bantuan ini. Dengan berbagai cara untuk memberitahu masyarakat akan adanya

program Dandan Omah yaitu seperti pemasangan spanduk, dan dari pengumuman RT/RW setempat berdasarkan dari kordinasi pemerintah.

Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu Apakah ada rapat koordinasi atau pelaporan rutin selama pelaksanaan?



Gambar 4. 4 Rapat Rutin

Sumber gambar : Dinas DPRKPP

“Ada, tiap tahap kita adakan rapat . Kalau ada kendala , langsung dibahas bersama. Laporan juga disusun secara periodik dan sangat terperinci sehingga berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian kita kirim ke dinas kadang bappeda juga. Sehingga rapat-rapat yang kita lakukan berjalan sesuai sop yang telah ditentukan.~ Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara diatas beliau menyatakan rapat yang dilakukan secara bersama dapat membuahkan hasil dan bisa dipahami oleh semua orang yang mengikuti rapat, sehingga ketika ada kendala dalam rapat dapat langsung dibahas dengan seksama. Kemudian hasil dari rapat bersama itu dikirimkan ke dinas untuk selanjutnya diproses oleh pihak yang berwenang.

Dan pertanyaan terakhir dalam indikator ini yaitu bagaimana komunikasi antara warga dan pelaksana program?

“Lumayan lancar. Biasanya warga langsung menyampaikan ke RT atau pengawas lapangan. Kalau ada keluhan, segera bisa ditindaki oleh pengawas ataupun pihak yang bertanggung jawab dilapangan. Kita juga meminta kontraktor untuk tetap standby dilapangan saat pembangunan dilaksanakan dikarenakan kalau ada masalah biar langsung bisa ditangani.~ Pak Arsyad 4 Juni.

Dari wawancara diatas menjelaskan komunikasi antara pelaksana program dan warga terbilang baik tetapi ada beberapa kendala, tetapi kendala tersebut bisa ditangani dengan sigap oleh pelaksana lapangan. Para pelaksana lapangan ditugaskan untuk sigap untuk menghadapi kendala yang ada dilapangan dengan begitu program akan berjalan lancar dan segera diselesaikan.

Adapun wawancara dari seorang warga bernama Ibu Sri Wahyuni yang mendapatkan bantuan program Dandan Omah.

Pertanyaan penelitian dari variabel komunikasi pada tanggal 6 Juni yang ditujukan kepada warga yang menerima bantuan yaitu, apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi yang cukup tentang program ini?

“Cukup jelas. Awal-awalnya saya tahu dari perkumpulan warga dikampung, terus juga ada sosialisasi dari kelurahan. Jadi saya engga bingung harus ngapain.”~Sri Wahyuni 6 Juni

Wawancara diatas menyatakan bahwa Ibu Sri Wahyuni sudah cukup jelas mengetahui program ini dikarenakan ada salah satu warga membicarakan tentang program Dandan Omah. Dan juga pihak kelurahan memberikan sosialisasi kepada warga.

Selanjutnya pertanyaan penelitian dari variabel Komunikasi yang ditujukan kepada warga yang menerima bantuan yaitu, melalui siapa informasi ini disampaikan?

“Pertama saya tau dari pak RT. Terus ada beberapa pihak kelurahan dan dinas terkait yang melakukan survey dan sosialisasi, mereka juga membawa surat-surat tentang program ini. Jadi semuanya sudah jelas.”~ Sri Wahyuni 6 Juni

Wawancara diatas menyatakan bahwa Ibu Sri Wahyuni mengetahui program ini dari RT. Lalu kelurahan dan dinas terkait melakukan survey dan sosialisasi.

Adapun wawancara dari kelurahan Tandes pada tanggal 10 Juni dengan Bapak Amanda Suryawan, A.Md. Berikut pertanyaan pertama yang ditujukan yaitu, bagaimana komunikasi antara kelurahan dan Dinas Perumahan?

“Cukup terbuka mas. Kami sering berkomunikasi lewat Whatsapp group dan rapat-rapat kecil. Tapi terkadang informasi teknis mendadak

sehingga kami harus cepat menyesuaikan dilapangan.”~ Pak Amanda 10 Juni.

Dari wawancara diatas komunikasi antara kelurahan dan Dinas Perumahan terbilang cukup lancar. Hal ini dapat mempercepat program ini terealisasi dengan baik. Komunikasi harus terus berjalan lancar agar program ini berjalan sesuai yang diinginkan.

Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk variabel komunikasi yang ditujukan untuk Kelurahan Tandes yaitu, Bagaimana penyampaian informasi kepada warga dilakukan?

“Biasanya kami umumkan lewat RT/RW, lalu didata siapa yang berminat dan memenuhi kriteria program. Kami juga tempelkan pengumuman dikantor kelurahan, tetapi tidak semua warga mendapatkan informasi secara langsung.”~ Pak Amanda 10 Juni

Dari penjelasan diatas informasi yang disampaikan Kelurahan melewati RT/RW setempat, dan ada juga pengumuman dikantor Kelurahan. Tetapi beberapa warga tidak menerima informasi tersebut.

5 **4.2.2 Sumber Daya**

Sumber daya merupakan konteks yang menjelaskan tentang antar individu yang terlibat dalam program dandan omah untuk melengkapi dari ke enam variabel teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 Juni oleh Bapak Arsyad selaku Sekretariat DPRKPP sebagai berikut.;

Dimulai dari pertanyaan apakah sumber daya yang tersedia mencukupi?

“Secara keseluruhan belum semua tercukupi. Tapi kita terus berusaha dan memaksimalkan yang ada dulu. SDM-nya terbatas apalagi tenaga teknis. Tapi kita terus kerja sama dengan kontraktor lokal sehingga bisa membagi tugas dengan efisien dan efektifitas. Dari kurangnya SDM ini ada kendala yang kita temui, tetapi kita bisa mengurangi tersebut dengan cara kerja sama tim yang sangat baik.”~ Pak Asyad 4 Juni

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut bapak Arsyad menyatakan SDM-nya masih terbilang kurang, sehingga menimbulkan adanya kendala yang terjadi. Tetapi pihak yang terlibat terus memaksimalkan program ini dengan baik baik kontraktor lokal maupun masyarakatnya. Dengan cara kerja sama tim yang baik kendala pun dapat teratasi dan membagi tugas agar bisa mengurangi SDM yang kurang memumpuni.

Pertanyaan peneliti kedua terkait sumber daya yaitu bagaimana ketersediaan dana dan tenaga teknis?

“Dana dari APBD dan kadang bantuan dari pusat yang terkait. Cuma terkadang cairnya tidak sesuai jadwal yang ditentukan, itu yang menjadi kendala bagi kami yang menjalankan program dilapangan. Tenaga teknis pun juga terbatas dikarenakan dana yang belum cair, tetapi kita manfaatkan yang semaksimal mungkin untuk keberlangsungan program ini.~ Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara tersebut bapak Arsyad menyatakan dana dan tenaga teknis masih ada kendala. Oleh karena itu terkadang program sedikit terhambat dengan kendala tersebut, akan tetapi pihak-pihak yang terlibat terutama kontraktor dan pemerintah memaksimalkan tenaga teknis yang terbatas agar bisa program ini terus berjalan sesuai rencana awal.

Pertanyaan terakhir dari indikator sumber daya yaitu apakah waktu pelaksanaan program cukup atau terbatas?

“Waktu pelaksanaannya terbilang cukup ketat, dikarenakan waktu yang diberikan cukup singkat. Karena ada target selesai ditahun anggaran berjalan, Sehingga kita harus cepat-cepat menyelesaikan program ini tepat waktu, apalagi kalau akhir tahun karena sudah dipenghujung anggaran tahunan.~ Pak Arsyad 4 Juni

Dari hasil wawancara terakhir bapak Arsyad menyatakan waktu yang cukup singkat untuk melakukan satu program ini, sehingga pihak-pihak yang terlibat harus cepat-cepat menyelesaikan program ini. Dan juga harus sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan untuk bisa menyelesaikan program yang berkelanjutan.

Adapun wawancara dari pada tanggal 6 Juni warga mendapatkan bantuan program ini yaitu Ibu Sri Wahyuni.;

Pertanyaan penelitian dari variabel sumber daya ditunjukkan kepada warga yang menerima bantuan yaitu, apakah bantuan perbaikan rumah sudah mencukupi?

“Iya cukup, Mas. Waktu itu tukangnya dua orang, ngerjainnya cepat juga. Bahan-bahannya dibawa sendiri sama kontraktor. Cuma pas hujan sempet molor dikit.”~Sri Wahyuni 6 Juni

Wawancara diatas menyatakan bahwa bantuan ini sudah mencukupi dari segi apapun hal ini menjadi acuan bahwa program ini berjalan dengan lancar.

Pertanyaan kedua penelitian dari variabel sumber daya yaitu, apakah tenaga pelaksana bekerja dengan baik?

“Lumayan cepat kok. Kalau nggak salah, sekitar dua minggu rumah saya selesai diperbaiki.”~ Sri Wahyuni 6 Juni.

Dari pernyataan diatas bahwa tenaga pelaksana terbilang baik ujar Ibu Sri Wahyuni, dalam waktu yang singkat rumah bisa diperbaiki.

Adapun wawancara dari kelurahan Tandes pada tanggal 10 Juni dengan Bapak Amanda Suryawan, A.Md. Berikut pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Amanda Suryawan, A.Md yaitu, apakah sumber daya yang dimiliki kelurahan cukup untuk mendukung pelaksanaan program?

“Secara ideal tidak mas. Kami sangat terbatas, terutama dari segi tenaga teknis. Anggaran operasional ditingkat kelurahan juga minim, sehingga kita bergantung pada Dinas Perumahan selaku pelaksana utama.”~ Pak Amanda 6 Juni

Dari pernyataan diatas sumber daya yang dimiliki Kelurahan sangat terbatas, karena anggaran yang bisa diberikan kelurahan juga minim. Sehingga Kelurahan bergantung kepada Dinas Perumahan selaku pelaksana dan pembuat program.

Pertanyaan kedua yang ditujukan untuk Bapak Arsyad selaku pihak Kelurahan yaitu, apa kendala sumber daya yang dihadapi?

“Waktu pelaksanaan yang singkat dan jumlah personel teknis yang terbatas membuat pemantauan tidak maksimal mas. Dan kadang-kadang juga terlambat menerima informasi teknis dan peralatan pendukung.”~ Pak

Amanda 6 Juni.

Dari pernyataan diatas menyatakan bahwa sumber daya yang dihadapi salah satunya waktu pelaksanaan kurang maksimal, sehingga ada sedikit hambatan. Terkadang ada informasi yang diterima kurang cepat sehingga terjadi miskomunikasi dan juga peralatan yang digunakan agak sedikit kurang terpenuhi.

4.2.3 Disposisi

Disposisi merupakan keterkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan terutama pelaksana kebijakan program Dandan Omah. Sikap ini juga sangat rentan untuk para pembuat kebijakan karena para pembuat kebijakan harus benar-benar bisa mengambil sikap dan keputusan yang benar sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam program Dandan Omah. Berikut adalah wawancara dengan bapak Arsyad selaku sekretariat DPRKPP. Sebagai berikut;

D⁷² pertanyaan pertama tentang disposisi yaitu, apa pendapat Anda terhadap program ini?

“Menurut saya program ini sangat baik. Program ini banyak membantu masyarakat yang memiliki hunian yang tidak layak dengan cara membantu memperbaiki rumah. Program ini bisa dirasakan langsung oleh warga, sehingga warga yang menerima bantuan ini dapat memiliki hunian yang layak ditempati dengan baik. Banyak rumah sebelum menerima bantuan ini yang hampir roboh dan sangat tidak layak ditempati, setelah mendapatkan program ini hunian warga akhirnya terbilang baik dari sebelumnya.” Pak Arsyad 4 Juni

Pernyataan hasil wawancara dari bapak Arsyad yaitu program ini sangat membantu warga terutama yang mendapatkan bantuan program Dandan Omah. Adanya program dandan omah yang diselenggarakan pemerintah terkait membuat warga sangat antusias, dan juga masyarakat menyambut program ini dengan baik.

Kemudian pertanyaan kedua terkait disposisi yaitu, apakah Anda melihat pelaksana program bekerja dengan komitmen?

“Iya. Mayoritas punya komitmen yang tinggi dan tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Meski ada beberapa tantangan yang ada tapi mereka bekerja sama dan bekerja keras dengan baik untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing dan saling bahu membahu untuk kepentingan bersama.” Pak Arsyad 4 Juni

D⁴² wawancara dari bapak Arsyad yaitu pelaksana program memiliki komitmen yang tinggi dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk tugas masing-masing. Dalam melaksanakan program ini masih terdapat kendala dan

“Iya, sangat sungguh-sungguh. Mereka kerja rapi, nggak asal-asalan. Saya juga dikasih tahu ini bantuan dari pemerintah, jadi harus dijaga baik-baik.” ~Sri Wahyuni 6 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa pelaksana program menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Dan juga pelaksana telah melakukan sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh pusat.

Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada keluhan dari warga lain?

“Tidak ada keluhan. Saya lihatnya tertib kok. Ada surat-surat, tanda tangan, bahkan rumah saya dipasangin stiker program gitu.” ~Sri Wahyuni 6 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana bahkan tidak ada keluhan dari masyarakat.

Adapun wawancara dari kelurahan Tandes pada tanggal 10 Juni dengan Bapak Amanda Suryawan, A.Md. Berikut pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Amanda Suryawan, A.Md yaitu, bagaimana komitmen pihak kelurahan terhadap keberhasilan program ini?

“Kami sangat mendukung program ini mas. Ini program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Kami berupaya aktif meskipun dengan keterbatasan yang ada.”. ~ Pak Amanda 10 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan Kelurahan sangat mendukung program Dandan Omah ini karena program ini langsung ke masyarakat secara transparansi. Meskipun ada keterbatasan, pihak kelurahan tetap terus berupaya mendukung hingga program ini terealisasi.

Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada kendala dalam sikap pelaksana lain?

“Ada beberapa kontraktor yang kurang responsif terhadap keluhan warga, terutama soal kualitas bangunan. Tapi dinasnya cepat menindaklanjuti ketika mendapat laporan tersebut mas.” ~ Pak Amanda 10 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa terdapat kendala dari kontraktor yaitu kurangnya respon cepat terhadap warga yang mengeluhkan sesuatu yang terjadi dilapangan.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan kebijakan yang kompleks dimana harus ada kerja sama dari pihak pelaksana dan masyarakat. Jika antara pihak pembuat kebijakan dan pihak-pihak terlibat tidak saling kordinasi maka struktur kebijakan tidak akan kondusif seperti yang diharapkan. Berikut wawancara dengan bapak Arsyad selaku sekretariat DPRKPP;

Pertanyaan pertama dengan variabel struktur birokrasi yang ditanyakan oleh peneliti yaitu, instansi mana saja yang terlibat?

"Yang utama tentu kami Dinas Perumahan. Karena kami yang mempunyai wewenang untuk melakukan dan mengatur kebijakan. Adapun kelurahan, RT/RW, walau kadang ada dinas sosial kalau terkait data keluarga miskin. Kontraktor juga terlibat karena kontraktor yang menjalankan pembangunan dilapangan." Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara diatas bapak Arsyad menyatakan bahwa dinas yang berkontribusi yaitu, Dinas Perumahan, Kelurahan, RT/RW, terkadang ada dinas sosial yang membantu untuk memberikan data keluarga miskin, dan terakhir kontraktor ini membantu proses pembangunan yang terjadi dilapangan.

Kemudian pertanyaan kedua yang ditujukan kepada bapak Arsyad mengenai struktur birokrasi yaitu, bagaimana koordinasi antar pelaksana, seperti DPRKP, kelurahan, RT/RW, dan kontraktor?

"Ya kita koordinasi rutin. Biasanya lewat rapat lintas sektor, Karena komunikasi berjalan dengan lancar kadang kita juga mengkonfirmasi kembali. Walau masih ada ditengah lapangan kita tidak perlu khawatir karena RT/RW bisa menanganai hal tersebut dan juga sangat aktif dalam program ini. Jadi dapat membantu program ini dengan sangat baik dan mempermudah komunikasi antar warga." - Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara diatas bapak Arsyad menyatakan bahwa koordinasi berjalan dengan baik dikarenakan para pihak pelaksana dan masyarakat memiliki komunikasi dengan baik begitu juga didukung oleh Kelurahan dan RT/RW setempat untuk berjalannya program ini.

Pertanyaan terakhir dari variabel struktur birokrasi yaitu, apakah ada SOP yang digunakan dalam pelaksanaan program?

"Iya. Kita menggunakan SOP yang sudah ditetapkan oleh dinas. Mulai dari awal proses pengusulan sampai pelaksanaan teknis pembangunan. Tapi ya terkadang harus sedikit fleksibel menyesuaikan dengan kondisi dilapangan." Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara diatas bapak Arsyad menyatakan bahwa setiap proses pembangunan selalu menggunakan SOP dinas tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Adapun wawancara dari warga penerima manfaat program Dandan Omah yaitu, Ibu Sri Wahyuni

Pertanyaan penelitian variabel struktur birokrasi yaitu, bagaimana sikap

petugas selama pelaksanaan program?

"Koordinasi sih, Mas. Soalnya tiap kali ada tukang yang mau mulai kerja, selalu ada pengawas yang datang dulu. Kadang juga saya diajak ngomong bareng biar sesuai maunya saya." ~Sri Wahyuni 6 Juni

Kemudian pertanyaan kedua dari variabel struktur birokrasi yaitu, Apakah petugas mudah dihubungi dan membantu?

"Yang saya tahu ya ada dari RT, kelurahan, terus orang dinas juga sempat ke sini. Sama kontraktor yang ngerjain rumah." ~Sri Wahyuni 6 Juni

Adapun wawancara dari kelurahan Tandes pada tanggal 10 Juni dengan Bapak Amanda Suryawan, A.Md. Berikut pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Amanda Suryawan, A.Md yaitu, bagaimana peran kelurahan dalam pelaksanaan program Dandan Omah?

"Kami bertugas untuk menjaring data calon penerima bantuan ini mas. Melalui RT/RW setempat melakukan verifikasi awal, dan menyampaikan usulan ke Dinas. Selain itu kami juga menjadi perantara antara warga dan pelaksana proyek." ." ~ Pak Amanda 10 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa kontribusi kelurahan sangat besar bagi warga dan dinas. Pihak kelurahan sebaga perantara berjalannya program ini membantu komunikasi antara warga dan tim pelaksana dilapangan.

Kemudian pertanyaan kedua dari variabel struktur birokrasi yaitu, Apakah ada koordinasi yang jelas antara kelurahan dan dinas?

"Ya,sejauh ini cukup baik. Ada rapat-rapat koordinasi selebelum pelaksanaan program dimulai dan beberapa kali program sedang berjalan. Tetapi terkadang ada miskomunikasi soal jadwal pelaksanaan dan teknis lapangan. ." ~ Pak Amanda 10 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa koordinasi yang dilakukan antara kelurahan dan dinas berjalan dengan baik. Namun terkadang ada beberapa kendala seperti miskomunikasi, tetapi hal itu segera diatasi oleh kedua belah pihak.

4.2.5 Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan variabel eksternal yang berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Variabel ini sangat penting karena mencakup kebijakan agar tidak terjadi kendala dan mencakup nilai, norma, serta karakteristik masyarakat yang dapat mendukung atau menghambat kebijakan, seperti tingkat partisipasi dan kesadaran warga.

Pertanyaan pertama peneliti dari variabel teori Lingkungan Sosial, Politik

dan Ekonomi yaitu, apa faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan program ini?

“Yang menjadi faktor pendorong utama itu dukungan besar dari masyarakat yang sangat antusias. Masyarakat yang mendapat program ini terkadang membantu pelaksana lapangan dalam menjakankan tugas. Faktor penghambatnya itu pencairan dana yang kadang terlambat, kendala lapangan seperti cuaca yang tidak bisa ditebak, serta akses yang sulit gangnya sempit sehingga alat-alat berat tidak bisa masuk.” Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara diatas pak Arsyad menyatakan faktor utama pendorong adalah antusias warga yang sanga tinggi. Karena dukungan warga itu sangat penting bagi keberlangsungan program ini. Adapun faktor penghambat yaitu beberapa rumah warga memiliki akses yang sempit dikarenakan memasuki perkampungan, serta cuaca yang terkadang sulit ditebak ketika melakukan pembangunan.

Pertanyaan kedua penliti dari variabel teori Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi yaitu, apakah ada tekanan dari pihak luar?

“Terkadang ada. Terutama dari tokoh masyarakat atau oknum lainnya yang ingin menitip nama penerima program bantuan. Tetapi kita terus professional dalam melakukan tugas dan menggunakan prosedur yang telah ditentukan.” Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara diatas pak Arsyad menyatakan terkadang ada tekanan dari pihak luar seperti tokoh masyarakat dan lainnya yang ingin mendapatkan program ini dengan cara tidak sesuai prosedur yang sudah ditentukan.

Pertanyaan terakhir peneliti dari variabel teori Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi yaitu, bagaimana respons masyarakat sekitar terhadap program ini?

“Sangat positif. Masyarakat sangat terbantu dengan bantuan ini, sehingga mereka sangat antusias terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pelaksana. Terlebih lagi menurut mereka program ini menyelamatkan hidup mereka dari yang sebelumnya rumah yang beanr-benar tidak layak menjadi sangat bisa dihuni dan baik.” Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara diatas pak Arsyad menyatakan bahwa program ini sangat membantu masyarakat karena pemerintah dan dinas terkait memberikan bantuan perbaikan rumah sehingga layak ditempati. Dan juga masyarakat menyambut dengan baik program yang diberikan dan sangat berterima kasih sebab program ini bisa membuat hunian mereka menjadi lebih baik.

Adapun wawancara dari warga yang menerima bantuan program Dandan Omah yaitu, Ibu Sri Wahyuni

Pertanyaan penelitian yang ditunjukkan kepada warga penerima bantuan program Danda Omah yaitu, apakah ada hambatan dari lingkungan saat program dilaksanakan?

“Ada sih, Mas. Waktu itu hujan terus jadi tukangnyanya agak lama kerja. Tapi ya namanya juga cuaca, ya kita mklum.” ~Sri Wahyuni 6 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan program salah satunya yaitu hujan.

Pertanyaan kedua dari penelitian yaitu, apakah lingkungan mendukung program ini?

“Sangat mendukung. RT-nya juga adil, siapa yang memang layak, itu yang dapet. Jadi nggak ada yang iri-iri banget lah.” ~Sri Wahyuni 6 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan banyak pihak yang mendukung pelaksanaan program ini salah satunya lingkungan yang menjadi dukungan bagi warga penerima manfaat.

Adapun wawancara dari kelurahan Tandes pada tanggal 10 Juni dengan Bapak Amanda Suryawan, A.Md. Berikut pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Amanda Suryawan, A.Md yaitu, Apakah kondisi sosial atau ekonomi masyarakat mempengaruhi pelaksanaan program?

“Sangat mempengaruhi mas. Misalnya, ada beberapa warga yang berharap mendapatkan bantuan tetapi tidak bisa karena belum memenuhi kriteria administrasi. Ada yang menolak karena takut rumahnya diubah terlalu banyak mas.” ~ Pak Amanda 10 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan program ini, karena beberapa warga tidak bisa mendapatkan bantuan ini sebab ada belum memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Kemudian pertanyaan kedua yaitu, Apakah ada dukungan dari tokoh masyarakat?

“Sangat mendukung,mas. Dukungan dari tokoh masyarakat sangat besar seperti RT/RW sangat kooperatif dalam mendata dan mendampingi warga yang menerima bantuan.” ~ Pak Amanda 10 Juni

4.2.6 Standar dan Tujuan Kebijakan

62 Komponen utama yang menentukan arah implementasi sebuah kebijakan. Standar berfungsi sebagai pedoman atau tolak ukur dalam pelaksanaan kebijakan,

sedangkan tujuan menggambarkan ⁷ hasil yang ingin dicapai. Hal ini sangat penting karena jika tidak tepat standard an tujuan kebijakannya maka program ni tidak akan berjalan sesuai rencana.

Pertanyaan pertama peneliti dari variabel Standard dan Tujuan Kebijakan yaitu, apa tujuan utama dari Program Dandan Omah menurut Anda?

“Tujuan utama program Dandan Omah ini yaitu buat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lebih tepatnya di Kota Surabaya. Khususnya warga yang memiliki hunian yang tidak layak untuk ditempati, sehingga program ini membantu perbaikan rumah lebih sehat, lebih aman, dan lebih layak.” Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara diatas pak Arsyad menyatakan bahwa tujuan utama program ini dibuat untuk meningkatkan kualitas hunian yang layak bagi merek yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan program hunian mereka menjadi lebih layak untuk ditempati.

Pertanyaan kedua peneliti dari variabel Standard dan Tujuan Kebijakan yaitu, apakah kriteria rumah tidak layak huni sudah jelas?



Gambar 4. 6 Rumah yang layak mendapat bantuan “Dandan Omah”

Sumber : Google

“Sudah cukup jelas sih. Ada beberapa indikator yang kita pakai misalnya, kondisi atap bocor, dinding, lantai, ventilasi udara, sanitasi. Tapi memang terkadang dilapangan kita perlu penilain secara visual langsung biar lebih akurat. Jadi kita bisa kombinasikan kriteria tertulis dan survey lapangan.” Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara diatas pak Arsyad menyatakan bahwa kriteria yang dipakai untuk program Dandan Omah ini sudah cukup jelas. Terlebih lagi data dan survey dilapangan membantu untuk melihat lebih jelas kriteria tertulis.

Pertanyaan terakhir peneliti dari variabel Standard dan Tujuan Kebijakan yaitu, bagaimana proses penentuan warga yang menerima bantuan?

“Prosesnya dimulai dari RT/RW, lalu diverifikasi oleh tingkat kelurahan. Setelah itu kita dari dinas turun langsung untuk survey dan validasi. Jadi tidak

semata-mata dari data saja, tapi kita pastikan langsung kondisinya. Baru setelah itu ditetapkan siapa yang berhak menerima bantuan.” Pak Arsyad 4 Juni

Dari wawancara diatas, pak Arsyad menyatakan bahwa untuk dapat program ini harus dari RT/RW terlebih dahulu, kemudian diverifikasi ke kelurahan terkait. Dinas akan datang langsung ke tempat untuk melakukan survey lapangan bukan hanya melihat dari data saja.

Adapun wawancara dari warga yang menerima bantuan program Dandan Omah yaitu, Sri Wahyuni.

Pertanyaan penelitian dari variabel standard dan tujuan kebijakan yaitu, apa Bapak/Ibu mengetahui tujuan dari program Dandan Omah?

“Awalnya saya ngga memahami mas, tetapi setelah dijelaskan saya paham. Menurut saya sih supaya rumah-rumah yang udah rusak, nggak layak huni, bisa diperbaiki. Jadi kita bisa tinggal dengan lebih nyaman, Mas. Saya tuh dulu atap rumah bocor parah, sekarang alhamdulillah udah dibenerin.” ~Sri Wahyuni 6 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa warga bisa memahami tujuan program ini dan terlebih lagi sudah dijelaskan oleh pelaksana program sehingga warga sangat terbantu dengan adanya program ini.

Pertanyaan kedua dari penelitian variabel standard dan tujuan kebijakan yaitu, apa harapan Bapak/Ibu dari program ini?

“Harapan saya program ini terus berjalan, karena masih banyak warga yang membutuhkan bantuan dari pemerintah terutama tentang hunian yang tidak layak ditempati.” ~Sri Wahyuni 6 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa warga berharap program ini terus berjalan, karena masih banyak warga yang belum menerima bantuan ini, sedangkan sangat membutuhkan bantuan ini. Karena program ini memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.

Adapun wawancara dari kelurahan Tandes pada tanggal 10 Juni dengan Bapak Amanda Suryawan, A.Md. Berikut pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Amanda Suryawan, A.Md yaitu, Apa Bapak/Ibu memahami tujuan utama dari program Dandan Omah?

“Ya, tentu. Tujuan utama program ini adalah membantu masyarakat yang memiliki hunian tidak layak menjadi layak huni bersih, aman, dan sehat. Program ini sangat membantu dan mensejahterahkan masyarakat.” ~ Pak Amanda 10 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa pihak kelurahan mengerti tujuan utama dilaksanakan program ini. Karena program ini sangat membantu masyarakat dan mensejahterahkan hunian masyarakat yang menerima bantuan.

Kemudian pertanyaan kedua yaitu, Siapa saja sasaran utama dalam program ini?

“Sasaran utama yaitu warga yang berpenghasilan rendah dan memiliki kriteria rumah yang jauh dari kata standar kelayakan mas. Biasanya kami prioritaskan lansia, keluarga miskin, penyandang disabilitas yang belum me dapatkan bantuan program serupa.”~Pak Amanda 10 Juni

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa prioritas utama yang menjadi sasaran program ini adalah keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas yang benar-benar tidak memiliki hunian yang layak.

4..2 Pembahasan

4.2.1 Komunikasi

Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, komunikasi menjadi elemen penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi suatu kebijakan publik. Komunikasi berfungsi untuk memastikan bahwa pesan dari pembuat kebijakan sampai kepada pelaksana dan sasaran kebijakan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami dengan baik. Komunikasi yang berjalan efektif akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam implementasi Program Dandan Omah, pemerintah daerah melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak kelurahan dan RT/RW sebagai perpanjangan tangan pelaksanaan di tingkat masyarakat. Komunikasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti rapat koordinasi, pengumuman dari RT/RW, pemasangan spanduk, hingga sosialisasi langsung di kantor kelurahan. Rapat-rapat yang diadakan dinilai produktif karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi wadah untuk membahas permasalahan teknis yang muncul di lapangan. Hasil dari rapat tersebut kemudian dikirimkan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Selain itu, pelaksanaan program juga melibatkan komunikasi langsung kepada warga penerima manfaat. Informasi mengenai program ini ada yang didapat dari penyebaran melalui jalur informal, seperti obrolan antarwarga, yang kemudian diperkuat dengan pengumuman resmi dari RT atau kelurahan. Setelah itu, dilakukan survei lapangan oleh pihak kelurahan bersama dinas teknis sebagai bentuk lanjutan dari proses komunikasi dan verifikasi. Hal ini mencerminkan adanya komunikasi dua arah yang bersifat partisipatif dan responsif, sesuai dengan prinsip implementasi kebijakan yang melibatkan semua elemen pelaksana dan penerima kebijakan.

Namun demikian, ditemukan juga hambatan dalam penyampaian informasi, di mana tidak semua warga memperoleh informasi secara merata. Masih ada warga yang mengaku tidak mengetahui keberadaan program secara langsung, baik karena tidak mendapatkan pemberitahuan dari RT maupun karena tidak mengakses pengumuman di kantor kelurahan. Hal ini mengindikasikan bahwa saluran komunikasi belum sepenuhnya menjangkau semua kalangan masyarakat, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan informasi.

Secara keseluruhan, implementasi komunikasi dalam Program Dandan Omah tergolong baik. Koordinasi antara dinas, kelurahan, dan RT/RW berjalan secara terstruktur dan intensif, sementara penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai media dan pendekatan. Namun, efektivitas komunikasi masih dapat ditingkatkan dengan sistem penyampaian yang lebih inklusif dan sistematis, agar tidak ada masyarakat yang terlewat dari informasi penting terkait program.

35 4.2.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu indikator utama dalam teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM), anggaran, informasi, dan fasilitas penunjang lainnya. Tanpa ketersediaan dan dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan atau program yang dirancang akan sulit diimplementasikan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Program Dandan Omah, terdapat kendala terkait ketersediaan sumber daya, terutama dalam hal tenaga pelaksana (SDM) dan teknis. Jumlah tenaga kerja dinilai masih terbatas, baik dari pihak kelurahan maupun mitra pelaksana seperti kontraktor. Keterbatasan ini memaksa pelaksana untuk membagi tugas secara efisien dan bekerja sama dalam satu tim untuk menutupi kekurangan tersebut. Pembagian peran dan kerja sama antar elemen pelaksana menjadi strategi utama untuk memastikan program tetap berjalan meskipun sumber daya terbatas.

Selain itu, terdapat kendala dalam alokasi dana dan peralatan teknis. Dalam beberapa kasus, anggaran yang tersedia dianggap cukup ketat, sehingga memerlukan efisiensi dalam penggunaannya. Kelurahan sendiri tidak memiliki kewenangan anggaran yang besar untuk mendukung program ini secara langsung, dan sepenuhnya bergantung pada Dinas Perumahan sebagai pemegang kendali teknis dan anggaran. Akibatnya, dalam kondisi tertentu, kelurahan hanya bertindak sebagai

penghubung komunikasi dan pelaksana administratif tanpa dapat memberikan intervensi pendanaan atau logistik yang signifikan.

Namun demikian, masih terdapat hambatan dalam hal informasi dan koordinasi, seperti adanya miskomunikasi atau keterlambatan informasi teknis yang diterima oleh pelaksana di tingkat bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem distribusi informasi dan kontrol teknis belum sepenuhnya efisien, dan memerlukan penguatan dalam manajemen proyek serta komunikasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, sumber daya dalam implementasi Program Dandan Omah tergolong cukup tetapi belum sepenuhnya ideal. Keterbatasan SDM, waktu, dan fasilitas memang menjadi tantangan, namun dapat diatasi melalui strategi pembagian peran, kerja sama lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat. Untuk keberlanjutan program ke depan, diperlukan penguatan alokasi sumber daya di tingkat pelaksana serta sistem monitoring yang lebih adaptif agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

4.2.3 Disposisi

Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan persepsi para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Apabila pelaksana memiliki sikap positif, komitmen yang tinggi, dan memahami tujuan kebijakan, maka implementasi cenderung akan berjalan lebih baik. Sebaliknya, jika pelaksana tidak mendukung, bersikap apatis, atau tidak memahami isi kebijakan, maka proses implementasi akan terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana Program Dandan Omah memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Program ini dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang menerima bantuan perbaikan rumah. Sikap antusias dari masyarakat turut memotivasi pelaksana untuk menjalankan tugas dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Pelaksana juga mengikuti prosedur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh dinas teknis, sehingga jalannya program menjadi lebih terstruktur dan terarah.

Dukungan dari kelurahan terhadap program ini juga sangat jelas terlihat. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal anggaran dan tenaga, kelurahan tetap aktif mendampingi dan memastikan program berjalan dengan baik di tingkat lapisan masyarakat. Dukungan ini memperkuat semangat pelaksana dan menambah

keyakinan bahwa program dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Program juga dinilai berjalan dengan lancar dan minim keluhan dari masyarakat. Ini mencerminkan bahwa para pelaksana telah menjalankan program dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan aspek transparansi serta keterlibatan masyarakat secara aktif. Sikap terbuka terhadap warga, serta kemampuan untuk menjalankan SOP dengan disiplin, menjadikan pelaksanaan program lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, indikator disposisi dalam implementasi Program Dandan Omah menunjukkan hasil positif. Komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan pelaksana menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran program. Meskipun terdapat sedikit hambatan dari mitra teknis, hal ini tidak secara signifikan mengganggu pelaksanaan program karena pelaksana tetap menunjukkan sikap profesional dan terbuka dalam menangani kendala. Untuk ke depan, perlu dilakukan penguatan terhadap mitra pelaksana (seperti kontraktor) agar mereka lebih responsif terhadap kebutuhan dan keluhan warga di lapangan.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam teori Van Meter dan Van Horn mencakup organisasi pelaksana kebijakan, prosedur kerja, dan pola koordinasi antar lembaga yang terlibat. Struktur birokrasi yang efektif harus memiliki pembagian tugas yang jelas, rantai koordinasi yang tertata, serta prosedur operasional yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Struktur ini menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Program Dandan Omah melibatkan berbagai elemen birokrasi, mulai dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) sebagai pelaksana teknis utama, kelurahan sebagai penghubung antara warga dan pelaksana, RT/RW sebagai unit sosial terdekat dengan masyarakat, hingga kontraktor sebagai mitra pelaksana pembangunan fisik rumah. Dalam beberapa kasus, Dinas Sosial juga ikut berkontribusi dalam penyediaan data rumah tangga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Setiap unsur pelaksana memiliki peran yang cukup strategis. Dinas perumahan bertanggung jawab dalam hal teknis pembangunan, penganggaran, dan pengawasan. Kelurahan bertindak sebagai penghubung utama yang mengelola

komunikasi antara warga dan pelaksana program. RT/RW menjadi pihak pertama yang mengetahui kondisi rumah warga dan membantu proses pengajuan bantuan. Sedangkan kontraktor bertugas memastikan pembangunan berjalan sesuai desain dan waktu yang ditentukan. Hubungan kerja antar lembaga ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi berjalan secara terintegrasi, meskipun berasal dari unit yang berbeda-beda.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antar instansi berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan oleh adanya komunikasi yang terbuka antara pelaksana teknis, pemerintah kelurahan, dan warga. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti miskomunikasi antar pelaksana di lapangan, misalnya dalam hal penyesuaian teknis atau perubahan jadwal pengerjaan. Namun, kendala tersebut umumnya dapat segera diatasi karena adanya komunikasi dua arah yang responsif dan fleksibilitas dalam struktur organisasi.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi dalam implementasi Program Dandan Omah sudah berjalan dengan baik dan terorganisir, meskipun masih ditemukan beberapa hambatan kecil dalam komunikasi teknis di lapangan. Keberadaan SOP dan pembagian tugas yang jelas antara dinas, kelurahan, RT/RW, dan kontraktor menciptakan sistem pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut, diperlukan peningkatan kapasitas komunikasi antar instansi serta penguatan mekanisme evaluasi lintas sektor agar miskomunikasi bisa diminimalkan.

10

4.2.5 Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

38

Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiganya dapat menjadi pendorong atau justru penghambat tergantung pada situasi yang dihadapi pelaksana di lapangan. Ketika lingkungan mendukung, maka proses implementasi dapat berlangsung efektif dan efisien. Sebaliknya, jika terjadi tekanan sosial-politik atau hambatan ekonomi, maka pelaksanaan kebijakan dapat terganggu.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Program Dandan Omah sangat dipengaruhi oleh tingginya antusiasme masyarakat. Dukungan sosial ini menjadi modal utama bagi pelaksana untuk menjalankan program secara maksimal. Warga menyambut baik program ini karena mereka merasa terbantu secara langsung, terutama bagi keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni. Lingkungan sosial yang saling mendukung dan semangat gotong royong warga

dalam membantu proses pembangunan juga menjadi kekuatan tersendiri yang mempercepat pelaksanaan program di lapangan.

Namun, kondisi sosial masyarakat juga menghadirkan tantangan. Misalnya, tidak semua rumah warga yang membutuhkan bantuan memenuhi kriteria administratif dan teknis, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pemberian bantuan. Beberapa warga yang tidak masuk dalam daftar penerima manfaat merasa kecewa, padahal secara kondisi fisik rumah mereka layak untuk dibantu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi warga menjadi pertimbangan yang kompleks dalam proses verifikasi dan penentuan sasaran program. Selain itu, keterbatasan pendapatan dan minimnya kesadaran administrasi warga juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan.

Dari sisi lingkungan fisik, pelaksanaan program seringkali terhambat oleh faktor geografis dan cuaca. Banyak rumah warga yang terletak di wilayah perkampungan padat penduduk dengan akses jalan yang sempit, sehingga menyulitkan proses distribusi material dan pengerjaan bangunan. Selain itu, cuaca yang tidak menentu, terutama saat musim hujan, menjadi kendala utama dalam menjaga efektivitas waktu pelaksanaan. Pelaksana harus menyesuaikan jadwal kerja dan pengerjaan di lapangan agar pembangunan tetap dapat diselesaikan tepat waktu meskipun harus menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah.

Secara keseluruhan, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam pelaksanaan Program Dandan Omah memberikan dampak yang dominan sebagai faktor pendukung, meskipun beberapa hambatan masih ditemui. Dukungan masyarakat dan lingkungan sosial menjadi kekuatan utama, sementara hambatan fisik dan tekanan politik tetap dapat dikendalikan oleh pelaksana melalui prosedur yang tepat dan pendekatan persuasif. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat secara aktif dan penguatan integritas pelaksana tetap menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program ini.

4.2.6 Standard dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan menjadi dasar utama dalam proses implementasi. Semakin jelas, spesifik, dan dipahami tujuan serta standar operasional suatu kebijakan, maka kemungkinan besar implementasi akan berjalan dengan efektif. Standar berfungsi sebagai pedoman kerja pelaksana, sedangkan tujuan menjadi arah capaian yang hendak diwujudkan oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tujuan utama Program

Dandan Omah adalah⁴ untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surabaya, khususnya mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni. Program ini hadir sebagai⁴ bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni. Pelaksanaan program tidak hanya memberi dampak fisik berupa perbaikan bangunan, tetapi juga berdampak sosial dengan meningkatkan martabat dan kenyamanan hidup warga penerima manfaat.

Pelaksana program memahami secara menyeluruh bahwa sasaran utama program ini adalah keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas yang benar-benar membutuhkan hunian yang layak. Kriteria penerima program juga dinilai sudah jelas, seperti kondisi atap yang bocor, lantai tanah, dinding rusak, dan ketiadaan fasilitas sanitasi. Kriteria ini tertuang dalam petunjuk teknis program dan menjadi rujukan dalam proses seleksi awal.

Proses implementasi program dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis. Usulan penerima manfaat diawali dari tingkat RT/RW, lalu diverifikasi di tingkat kelurahan. Setelah itu, tim dari dinas teknis akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan, tidak hanya berdasarkan data administratif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya mengandalkan dokumen, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan sebagai dasar penentuan kelayakan. Hal ini menjamin bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada pihak yang tepat dan paling membutuhkan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, keterbatasan anggaran dan kuota bantuan setiap tahunnya menjadi tantangan tersendiri. Walaupun tujuan kebijakan sudah jelas dan disambut baik oleh masyarakat, realisasi program belum bisa mencakup semua warga yang membutuhkan secara sekaligus. Oleh karena itu, penetapan prioritas menjadi strategi penting, dan pelaksana program telah mengupayakan agar mereka yang berada dalam kondisi paling mendesak mendapatkan bantuan terlebih dahulu.

Secara keseluruhan, indikator⁹ standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi Program Dandan Omah telah berjalan dengan baik dan sesuai teori. Tujuan program yang spesifik, realistis, dan dapat dipahami oleh semua pelaksana serta masyarakat menjadi kekuatan utama dalam proses implementasi. Selain itu, adanya mekanisme verifikasi langsung di lapangan dan keterlibatan RT/RW dan kelurahan sebagai filter awal memperkuat proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk memperluas cakupan bantuan agar tujuan kebijakan ini dapat tercapai secara menyeluruh dan merata.

4.2.7 faktor pendorong dalam mengimplementasiasikan program :

1. Komunikasi yang efektif

- Adanya sosialisasi DPRKPP kepada kelurahan dan masyarakat
- Informasi mengenai prosedur dan syarat bantuan disampaikan secara terbuka
- Penempelan stiker sebagai bukti verifikasi rumah calon penerima bantuan

2. Sumber daya yang mendukung

- Tersedianya anggaran meski terbatas, namun cukup untuk rumah prioritas
- Ketersediaan SDM seperti tim teknis, staf kelurahan, dan pekerja lokal
- Adanya bantuan material yang langsung diberikan ke penerima manfaat

3. Disposisi atau sikap pelaksana

- Lurah, staf kelurahan, dan petugas teknis menunjukkan antusiasme dalam menjalankan program
- Komitmen pelaksana dalam menindaklanjuti usulan warga dan memastikan bantuan secara tepat sasaran

4. Struktur birokrasi yang mendukung

- Tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas dalam proses pengajuan bantuan
- Koordinasi antara kelurahan dan dinas berjalan secara rutin dan formal

73 **5. Lingkungan sosial, Ekonomi, dan Politik**

- Partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong dan pelibatan warga setempat dalam proses pembangunan

- Lingkungan Politik mendukung melalui kebijakan Perwali No.35 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pelaksanaan

6. Standard an tujuan jelas

- Program memiliki tujuan konret, yaitu ¹⁷ mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup warga
- Target bantuan rumah tiap tahun ditentukan secara terukur dan sesuai kondisi lapangan

Berikut beberapa faktor penghambat dalam mengimplementasiasian program

1. Keterbatasan sumber daya (SDM)

- Tenaga pelaksana di lapangan terbatas baik dari segi jumlah maupun keterampilan teknis. Keterbatasan ini menghambat efisiensi waktu dan kualitas pelaksanaan perbaikan rumah.

2. Keterbatasan anggaran dan sumber daya teknis

- Beberapa tahapan pelaksanaan terganggu akibat terbatasnya dana yang tersedia di tingkat pelaksana. Selain itu, ketersediaan alat dan material tidak selalu mencukupi sesuai kebutuhan di lapangan.

3. Waktu pelaksanaan yang singkat

- Durasi pelaksanaan program dalam satu periode dianggap terlalu sempit, sehingga pelaksana harus bekerja secara cepat tanpa ruang waktu yang cukup untuk mengantisipasi kendala teknis yang muncul.

4. Akses lokasi rumah yang sempit

- Banyak rumah penerima bantuan terletak di kawasan padat atau gang sempit, sehingga menyulitkan distribusi material dan peralatan ke lokasi pembangunan.

5. Kondisi cuaca tidak menentu

- Cuaca, khususnya hujan yang tidak dapat diprediksi, seringkali menghambat proses pengerjaan dan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek.

6. Miskomunikasi antar pelaksana

- Terkadang terjadi miskomunikasi antara kelurahan, dinas, dan kontraktor terkait waktu dan teknis pelaksanaan, meskipun dapat segera ditangani.

7. Tekanan dari pihak luar

- Terdapat tekanan dari tokoh masyarakat atau pihak luar yang berusaha mengintervensi daftar penerima bantuan agar memasukkan nama-nama tertentu yang tidak sesuai kriteria teknis.

8. Keterbatasan dana yang akurat dan real-time

- Meskipun verifikasi lapangan dilakukan, data awal dari RT/RW atau kelurahan terkadang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil atau belum mutakhir.

9. Ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan standar SOP

- Standar prosedur kadang tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi fisik rumah penerima di lapangan, sehingga pelaksana harus melakukan penyesuaian spontan tanpa panduan teknis terperinci.

10. Belum semua warga mendapatkan informasi program

- Sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga ada warga yang tidak mengetahui mekanisme pendaftaran atau seleksi penerima bantuan.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

14 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi Program Dandan Omah oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, dapat 55impulkan bahwa pelaksanaan program ini telah berjalan secara relatif efektif dalam mewujudkan 39an rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui pendekatan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, ditemukan bahwa hampir seluruh indikator pelaksanaan telah dijalankan dengan cukup baik, seperti komunikasi antar pelaksana dan sasaran yang berjalan lancar, ketersediaan sumber daya manusia serta anggaran yang memadai, dan adanya dukungan dari struktur birokrasi melalui prosedur operasional standar yang telah ditetapkan. Sikap dan komitmen para pelaksana terhadap tujuan 10ogram pun menunjukkan kecenderungan positif, ditambah dengan dukungan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang cukup mendukung kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Meski demikian, beberapa hambatan teknis seperti keterbatasan data penerima manfaat, lamanya proses administratif, serta ketidaksesuaian antara harapan warga dan realisasi bantuan masih perlu dibenahi ke depannya. Dengan mengintegrasikan prinsip padat karya dan pemberdayaan masyarakat, program ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik hunian, tetapi juga meningkatkan taraf hidup dan partisipasi sosial warga. Oleh karena itu, Program Dandan Omah dinilai berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas permukiman dan kehidupan masyarakat kota Surabaya secara menyeluruh.

5.2 Saran

14 Saran peneliti, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Dandan Omah, disarankan agar Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memperkuat sistem pendataan dan verifikasi penerima manfaat berbasis teknologi agar lebih akurat dan transparan, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan, serta memperluas kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi sosial guna mendukung pembiayaan dan pelaksanaan program. Selain itu, penting dilakukan peningkatan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk memperjelas hak dan kewajiban penerima bantuan, serta membangun kesadaran akan pentingnya pemeliharaan rumah pasca-renovasi. Pemerintah juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk mengukur capaian dan efektivitas program serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan

keterampilan teknis dan program padat karya diharapkan dapat memperkuat dampak ekonomi dari program ini dan menciptakan kemandirian warga penerima manfaat.

Skripsi Ivan

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.univrab.ac.id	2%
	Internet Source	
2	repository.ar-raniry.ac.id	1%
	Internet Source	
3	www.scribd.com	1%
	Internet Source	
4	repository.upnjatim.ac.id	1%
	Internet Source	
5	positori.usu.ac.id	<1%
	Internet Source	
6	bappeko.surabaya.go.id	<1%
	Internet Source	
7	www.coursehero.com	<1%
	Internet Source	
8	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet Source	
9	bappelitbangda.bandungbaratkab.go.id	<1%
	Internet Source	
10	ejournal.unesa.ac.id	<1%
	Internet Source	
11	pdffox.com	<1%
	Internet Source	
12	docplayer.info	

13

www.wartatransparansi.com

Internet Source

<1 %

14

www.harianbhirawa.co.id

Internet Source

<1 %

15

digilib.unimed.ac.id

Internet Source

<1 %

16

Naila Falichatul Muannisa, Wahyu Sulistiadi.
"Analisis Implementasi Program Active Case
Finding Tuberkulosis di Puskesmas
Kebayoran Baru dengan Pendekatan Teori
Van Meter Van Horn", Jurnal Ners, 2025

Publication

<1 %

17

ejournal.kemsos.go.id

Internet Source

<1 %

18

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

19

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

20

suarapubliknews.net

Internet Source

<1 %

21

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

22

repository.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

23

repository.unimor.ac.id

Internet Source

<1 %

24

www.bualbual.com

Internet Source

<1 %

25	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
26	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.pertamina.com Internet Source	<1 %
28	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
29	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1 %
30	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
31	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %
32	core.ac.uk Internet Source	<1 %
33	dishubbitung.org Internet Source	<1 %
34	katalog.ukdw.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1 %
36	umkm.kompas.com Internet Source	<1 %
37	Citra Kristin, Sri Wibawani. "Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota	<1 %

Surabaya", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2023

Publication

38	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper	<1 %
39	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	<1 %
40	eprints.unmer.ac.id Internet Source	<1 %
41	journal.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
43	www.goindonesia.id Internet Source	<1 %
44	Vera Iriani Abdullah, Wiwit Vitania. "Evaluasi pelaksanaan program rumah tunggu kelahiran (RTK) dengan logic model di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua", MEDIA ILMU KESEHATAN, 2023 Publication	<1 %
45	adijambul.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	alisadikinwear.wordpress.com Internet Source	<1 %
47	contohmakalahterlengkap.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %

49	Internet Source	<1 %
50	jurnal.asmtb.ac.id Internet Source	<1 %
51	jurnal.stiatabalong.ac.id Internet Source	<1 %
52	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
53	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
54	pkb-jatim.com Internet Source	<1 %
55	radarmadiun.jawapos.com Internet Source	<1 %
56	ruslan.blog.uma.ac.id Internet Source	<1 %
57	www.harisyuliana.com Internet Source	<1 %
58	www.impiannews.com Internet Source	<1 %
59	123dok.com Internet Source	<1 %
60	Oke Dwi Purwanti, Syakdiah Syakdiah, Matheus Gratiano Mali. "Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Kecamatan Ngampilan", POPULIKA, 2023 Publication	<1 %
61	Submitted to Politeknik STIA LAN Student Paper	<1 %

62	adoc.pub Internet Source	<1 %
63	adoc.tips Internet Source	<1 %
64	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
65	dprdkotamobagu.org Internet Source	<1 %
66	id.123dok.com Internet Source	<1 %
67	ilmucerdaspendidikan.wordpress.com Internet Source	<1 %
68	issuu.com Internet Source	<1 %
69	jdih.surabaya.go.id Internet Source	<1 %
70	journal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
71	kebumenkab.go.id Internet Source	<1 %
72	pakarti.wordpress.com Internet Source	<1 %
73	pasca.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
74	pojokbanua.com Internet Source	<1 %
75	riau.antaranews.com Internet Source	<1 %

76	saepudinonline.wordpress.com Internet Source	<1 %
77	semnastsda-bdg.web.id Internet Source	<1 %
78	vdocuments.net Internet Source	<1 %
79	www.bkprn.org Internet Source	<1 %
80	www.solidaritasperempuan.org Internet Source	<1 %
81	dciesm.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off